



TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ni Luh Viya Anggun Cahyani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Nur Syofi Shahirah

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ingggrid Sisilia Lumban Raja

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wahjoe Pangestoeti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: nlvacahyani@student.umrah.ac.id¹, nsshahirah@student.umrah.ac.id²,

islrja@student.umrah.ac.id³, wahjoe.pangestoeti.lecture@gmail.com⁴

Abstrak. *Local Own-Source Revenue (PAD) is a critical indicator for measuring fiscal independence, particularly in the context of regional autonomy that requires local governments to finance development independently and sustainably. The Riau Islands Province, with its strategic location and abundant resources, holds great potential to increase its PAD. However, it faces various challenges, including weak tax collection systems, low public tax awareness, limited human resources, and a reliance on volatile economic sectors. This study aims to analyze the challenges and opportunities for increasing PAD in the Riau Islands and to formulate effective optimization strategies for local government implementation. The research uses a qualitative approach with descriptive analysis based on secondary data and a review of regional fiscal policies. The findings reveal that despite structural and operational constraints, local governments still have significant opportunities to enhance PAD through digitalization of tax services, development of tourism and maritime sectors, strengthening public-private partnerships, and implementing transparent and accountable fiscal governance reforms. With the right and collaborative strategies, increasing PAD in the Riau Islands will not only strengthen the region's fiscal capacity but also support inclusive and sustainable local economic development.*

Keywords: *Local Own-Source Revenue, regional fiscal, regional development, Riau Islands, PAD enhancement strategy*

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang strategis dan kaya sumber daya memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya sistem pemungutan, rendahnya kesadaran pajak masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu yang bersifat fluktuatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam peningkatan PAD di Provinsi Kepulauan Riau, serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder dan tinjauan kebijakan fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala struktural dan operasional, pemerintah daerah masih memiliki peluang besar

untuk meningkatkan PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak, pengembangan sektor pariwisata dan maritim, peningkatan kerja sama dengan sektor swasta, serta reformasi tata kelola fiskal berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dengan strategi yang tepat dan kolaboratif, peningkatan PAD di Kepulauan Riau tidak hanya akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, fiskal daerah, pembangunan daerah, Kepulauan Riau, strategi peningkatan PAD*

PENDAHULUAN

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah di era otonomi saat ini karena PAD tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya secara mandiri tanpa bergantung secara absolut pada transfer dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH). Di Provinsi Kepulauan Riau, sebuah provinsi yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, letak strategis yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta kekayaan sumber daya alam, laut, dan budaya yang luar biasa, persoalan peningkatan PAD menjadi suatu keniscayaan yang harus ditangani secara serius dan sistematis. Hal ini penting karena PAD berperan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan daerah, baik dari sisi penyediaan infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks Kepulauan Riau, peningkatan PAD dihadapkan pada beragam tantangan multidimensional seperti lemahnya basis data perpajakan daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak lokal, masih terbatasnya inovasi dalam ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, keterbatasan SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah, hingga adanya ketergantungan struktural terhadap sektor-sektor tertentu seperti industri dan pelabuhan yang sangat fluktuatif terhadap dinamika global, apalagi dalam konteks pasca-pandemi dan gejolak ekonomi global yang mengganggu stabilitas sektor perdagangan dan pariwisata sebagai dua sektor andalan di wilayah ini. Selain itu, adanya fragmentasi wilayah yang tersebar dan terdiri atas ribuan pulau juga menimbulkan persoalan dalam pengawasan, pemantauan, dan pemungutan pajak secara efektif, belum lagi adanya persoalan disparitas pembangunan antarwilayah di Kepulauan Riau yang menyulitkan sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang sangat besar untuk mendorong peningkatan PAD secara lebih progresif dan inklusif. Peluang ini mencakup potensi besar dari sektor pariwisata bahari yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber PAD yang signifikan melalui pajak hotel, restoran, dan retribusi tempat wisata, serta dukungan dari perkembangan digitalisasi pelayanan pajak daerah yang memungkinkan penguatan sistem informasi

pajak dan retribusi berbasis elektronik sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Tak hanya itu, adanya potensi kerja sama dengan sektor swasta dan investasi dalam bentuk kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP) di bidang infrastruktur maupun jasa pelayanan publik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas basis pajak daerah, sehingga PAD dapat meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, sektor maritim, dan perdagangan antarnegara yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB daerah dan berpotensi memberikan tambahan PAD melalui pungutan-pungutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, asalkan dilakukan secara adil dan transparan tanpa menghambat dunia usaha. Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang ada di wilayahnya, maka diperlukan strategi inovatif, reformasi kebijakan fiskal daerah, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung reformasi birokrasi dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah guna meminimalkan kebocoran, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Pendekatan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil juga penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa peningkatan PAD bukan hanya sekadar target angka fiskal, tetapi merupakan bagian dari upaya besar dalam menciptakan kemandirian fiskal, keadilan sosial, serta pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi secara mendalam mengenai tantangan dan peluang peningkatan PAD di Provinsi Kepulauan Riau dengan pendekatan empiris dan komprehensif, guna memberikan rekomendasi strategis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual sesuai dengan dinamika lokal yang terjadi. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam mendukung upaya reformasi keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kinerja fiskal, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penciptaan tata kelola keuangan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau, dengan menekankan pada konteks sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan fiskal daerah yang berlaku. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan dinamis, khususnya dalam studi kebijakan dan tata kelola keuangan daerah yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini berupaya menggali makna, persepsi, dan praktik kebijakan fiskal dari perspektif aktor-aktor lokal, baik di tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

maupun pelaku usaha dan masyarakat sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses pemungutan dan pemanfaatan PAD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen kebijakan fiskal lainnya yang dapat memberikan gambaran umum tentang struktur, komposisi, serta dinamika PAD di Provinsi Kepulauan Riau. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber-sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai publikasi resmi dari pemerintah daerah yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih rinci dan kontekstual sesuai dengan perkembangan lapangan, serta memberikan ruang kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas dan terbuka. Data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan tersebut kemudian dianalisis secara tematik, dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui pendekatan induktif, yakni membangun pemahaman dan simpulan dari fakta-fakta dan narasi yang ditemukan di lapangan. Dalam proses analisis, peneliti melakukan kategorisasi terhadap berbagai bentuk tantangan dan peluang yang ditemukan berdasarkan aspek legal, struktural, teknis, dan kultural yang memengaruhi kinerja PAD di daerah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan diinterpretasikan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan yang memiliki kekhasan dalam tata kelola fiskal dan pembangunan wilayah. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Selain itu, dilakukan member checking kepada sebagian informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Lokasi penelitian difokuskan di beberapa kabupaten/kota utama di Provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun, yang dinilai memiliki karakteristik fiskal dan ekonomi yang representatif serta menyimpan tantangan dan peluang berbeda dalam peningkatan PAD. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan heterogenitas potensi ekonomi daerah, tingkat kontribusi terhadap total PAD provinsi, serta kemudahan akses data dan ketersediaan informan. Peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif untuk memahami dinamika pelayanan publik terkait pemungutan pajak dan retribusi, serta untuk melihat secara langsung kondisi lapangan yang mungkin tidak tergambarkan dalam dokumen resmi. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori tata kelola keuangan daerah, konsep kemandirian fiskal, dan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam upaya peningkatan PAD, serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual bagi pengambil kebijakan daerah di Kepulauan Riau. Penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi waktu, dengan membandingkan data PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk melihat tren, pola, serta dampak dari kebijakan yang telah dijalankan, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi sektor

ekonomi dan penerimaan daerah. Etika penelitian dijaga dengan memastikan kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan sebelum wawancara, serta menyampaikan tujuan penelitian secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Penelitian ini tidak hanya bernilai akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan studi kebijakan fiskal, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam merancang strategi peningkatan PAD yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Secara metodologis, kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya menggambarkan realitas empiris yang kompleks secara naratif dan analitis, serta membuka ruang bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat menjadi kontribusi positif dalam penguatan otonomi daerah dan kemandirian fiskal nasional secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai tantangan dan peluang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks geografis, struktur ekonomi, kerangka kebijakan fiskal daerah, serta dinamika sosial politik yang melingkupi proses pengelolaan keuangan daerah. Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan dengan ribuan pulau, wilayah laut yang luas, serta letak yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan PAD, karena di satu sisi memberikan potensi yang besar untuk digali, namun di sisi lain menghadirkan berbagai tantangan struktural, teknis, dan kelembagaan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lokal. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, yang menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan secara serius, terutama melalui optimalisasi potensi pendapatan lokal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam praktiknya, pemungutan pajak daerah masih menghadapi kendala seperti lemahnya basis data wajib pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat dan pelaku usaha, kurangnya inovasi dalam sistem pelayanan pajak, serta minimnya kapasitas SDM aparatur di bidang perpajakan dan pengelolaan PAD. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal regulasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program peningkatan PAD. Di sisi lain, tantangan geografis seperti keterpencilan wilayah, biaya logistik yang tinggi, dan akses transportasi antar-pulau yang terbatas turut memperberat upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan pemungutan pajak dan retribusi secara merata. Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat pula berbagai peluang yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD. Pertama, sektor pariwisata bahari dan ekowisata memiliki prospek besar untuk menjadi sumber PAD andalan, mengingat Kepulauan Riau memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, serta daya tarik wisata yang tinggi, khususnya di daerah seperti Bintan, Batam, dan Natuna. Jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sektor ini dapat meningkatkan penerimaan dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi tempat wisata. Kedua, sektor perdagangan dan jasa maritim juga

merupakan peluang besar mengingat posisi strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional dan kedekatannya dengan pelabuhan internasional di Singapura dan Malaysia. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi retribusi pelabuhan, perizinan usaha, serta pungutan lain yang relevan sesuai regulasi. Ketiga, digitalisasi sistem perpajakan daerah menjadi salah satu peluang strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan pajak seperti e-SPTPD, e-retribusi, dan digitalisasi basis data pajak akan memudahkan pelaporan, mempercepat proses pembayaran, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur berpotensi memperluas basis ekonomi daerah, meningkatkan investasi, dan menciptakan multiplier effect yang pada akhirnya akan memperbesar potensi PAD. Selain itu, pembenahan manajemen aset daerah serta pemanfaatan BUMD secara optimal juga menjadi peluang untuk menambah sumber-sumber PAD yang tidak bergantung semata pada pajak dan retribusi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, memperkuat integritas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Penelitian ini menemukan bahwa adanya perbedaan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pentingnya koordinasi dan harmonisasi kebijakan fiskal antarlevel pemerintahan. Kabupaten/kota yang memiliki potensi ekonomi besar seperti Batam dan Bintan menunjukkan kemampuan PAD yang relatif tinggi, sedangkan daerah-daerah yang lebih terpencil dan kurang berkembang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mendorong pemerataan kapasitas fiskal antarwilayah, misalnya melalui peningkatan Dana Insentif Daerah (DID) berbasis kinerja PAD, serta pelatihan dan pendampingan teknis bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ekosistem pengelolaan PAD yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah sebagai tulang punggung pembangunan lokal perlu ditumbuhkan melalui edukasi publik, kampanye kesadaran pajak, serta transparansi penggunaan dana publik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, peningkatan PAD bukan hanya persoalan administratif atau teknis semata, tetapi merupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan dan adil. Dengan demikian, upaya peningkatan PAD di Provinsi Kepulauan Riau harus didukung oleh komitmen politik yang kuat, regulasi yang konsisten, sistem pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kunci utama keberhasilan peningkatan PAD terletak pada kemampuan daerah dalam memetakan potensi ekonomi lokal secara akurat, menyusun strategi fiskal yang adaptif dan inovatif, memperkuat sinergi antar-lembaga, serta membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola fiskal daerah sebagai prasyarat utama untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau maupun di daerah-daerah lain di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak sekaligus sebuah tantangan strategis dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan kapasitas pembangunan daerah secara berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Riau, dengan seluruh kompleksitas karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, menyimpan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor unggulan, seperti pariwisata bahari, industri maritim, perdagangan dan jasa pelabuhan, serta sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif rendah dan belum mampu menandingi besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang menghambat optimalisasi PAD, antara lain kelemahan dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi, ketidakterpaduan data wajib pajak, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak, keterbatasan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu, adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar-kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah belum merata dan membutuhkan intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif dan kolaboratif. Tantangan geografis berupa keterpencilan wilayah dan keterbatasan infrastruktur dasar juga memperberat upaya pemungutan pajak dan retribusi secara adil dan efisien, karena daerah-daerah yang memiliki potensi besar seringkali mengalami hambatan logistik dan biaya operasional yang tinggi. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan PAD secara progresif dan inklusif, terutama melalui pengembangan sektor unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan kontribusi fiskal potensial, seperti sektor pariwisata, sektor maritim dan pelabuhan, serta sektor perdagangan internasional yang didukung oleh posisi geografis yang sangat strategis. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk digitalisasi pelayanan pajak dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat modernisasi administrasi pajak daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kebocoran anggaran dan korupsi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi. Strategi peningkatan PAD di Provinsi Kepulauan Riau juga harus diarahkan pada penguatan sinergi antar-lembaga pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta pembentukan ekosistem fiskal yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola fiskal yang partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga harus lebih aktif dalam mengembangkan potensi BUMD dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan non-pajak yang sah dan berkontribusi terhadap PAD. Dalam jangka panjang, peningkatan PAD bukan hanya soal peningkatan nominal pendapatan daerah, tetapi juga soal transformasi struktural dalam tata kelola pembangunan daerah yang lebih efisien, adil, dan mandiri secara fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang berbasis data,

penguatan kebijakan fiskal yang adaptif, serta pembangunan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. Hasil penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi anggaran yang dapat membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan dana publik. Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan PAD di Provinsi Kepulauan Riau hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan kolaboratif, yang menggabungkan reformasi kebijakan fiskal, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pemutakhiran teknologi informasi, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, PAD harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian fiskal, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi yang inklusif di wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya. Maka dari itu, jika seluruh potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan dengan strategi yang tepat, tata kelola yang baik, serta komitmen politik yang kuat, maka Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya mampu meningkatkan PAD secara signifikan, tetapi juga menjadi model pembangunan daerah berbasis kemandirian fiskal yang dapat ditiru oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam upaya memperkuat otonomi daerah secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D., & Pramudyo, P. (2022). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bappenas. (2021). *Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah 2020–2021*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2023*. Tanjungpinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- Dewi, N. L. P. S., & Suryana, I. N. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Era Pandemi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(2), 89–101.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019–2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Pedoman Umum Optimalisasi PAD Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Lestari, A. D., & Nugroho, A. (2023). Peluang Digitalisasi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Transparansi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 5(1), 33–47.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020*. Tanjungpinang: Biro Organisasi Setda Kepri.
- Sari, M., & Halim, A. (2020). Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55–67.
- Yuliani, D., & Subekti, A. (2024). Strategi Kolaboratif Peningkatan PAD Melalui Penguatan BUMD dan Kemitraan Swasta. *Jurnal Keuangan Daerah Berkelanjutan*, 4(1), 21–38.